

DAFTAR PUSTAKA

- Albugis, F. F. (2016). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah provinsi sulawesi utara. *Jurnal EMBA*, 4(3), 78–89.
- Alfurkaniati, Safrida, L., Nasirwan, Harmain, H., Nurlaila, Lande, A., Limaryani, S., Sejati, F. R., Muthmainnah, Ernawati, Y., & Safrita. (2017). *Pengantar Akuntansi 1*. Madenatera.
- Anggraeni, U. S., & Taufiqur Rohman. (2021). Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 33–66.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember*. 2(3), 473–485.
- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. UMSIDA PRESS.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Dia Mubaroka, Ask, N. S., & Junaidi. (2017). *Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa (Studi Kasus Di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Jawa Timur)*. 6, 91–112.
- Gustina, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Hanifah, S. I. (2015). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. 4(8).

- Harahap, I., Nasution, Y. S. J., Marliyah, & Syahriza, R. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Kencana.
- Harahap, R. D., & Marliyah. (2021). *Akuntansi Syari'ah*. FEBI UIN-SU Press.
- Hariatih, & Sukardi. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal PenKomi*, 4(1), 47–59.
- Ikhsan, A., Albra, W., Aziza, N., Khaddafi, M., Hayat, A., Oktaviani, A., & Lesmana, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Madenatera.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma*. 9(2), 131–140.
- Jatmiko, B., Prawoto, N., Astuti, R. J., Sari, R. N., & Ardhi, K. F. (2019). Application of Government Accounting Standards , Financial Statements Reporting , and Accessibility of Regional Finance Against Accountability for Regional Financial Management (Survey of All SKPDs of Kulon Progo Regency Government). *Atlantis Press*, 102(Icaf), 6–12.
- Jaya, I. M. L. M. (2014). Accounting Treatment In Village Public Sector. *Gorontalo Accounting Journal*, 113, 1–10.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset*, 4.
- Khaddafi, M., Siregar, S., Harmain, H., Nurlaila, Zaki, M., & Dahrani. (2016). *Akuntansi Syariah*. MADENATERA.
- Lubis, A. W. (2020). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. FEBI UINSU Medan.

- Lubis, S. M. Y. (2019). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)*. 1.
- Mulyanto, Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variab. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 6(1), 1–17.
- Noho, M., & Ali, Y. (2021). Penerapan PSAP No.01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Di Desa Pentadio Timur. *Jurnal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 24–30. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.24-30.2021>
- Noviyanto, E. M. dan H. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa (Studi di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur). *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 171–183.
- Presiden republik indonesia.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. PT. Bumi Aksara.
- Rahayu, H., & Handayani, N. (2019). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5).
- Runtuuwu, K. V., Tamboto, H., & Kambey, J. (2021). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 168–175.
- Shuida, N. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan UUD No.6 Tahun 2014 tetang Desa*.

Tangkaroro, K. L., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). *Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. 12(2), 671–680.

Tiyas, B. A., & Pravitasari, D. (2021). *Pengelolaan Keuangan Sebagai Pertanggungjawaban Dalam Pembelanjaan Dana Desa Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung*. 02(02), 63–74.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Warsi, D. A. S., & Handayani, K. (2019). *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Studi Pada Pemerintah Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten*. 2(1), 27–38.

Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. CV.Noah Aletheia.

Zamzami, F., & Nusa, N. D. (2017). *Akuntansi Pengantar I*. Gajah Mada University Press.

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan pada saat wawancara berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber.

A. Penerapan Akuntansi dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

1. Bagaimana prosedur/penerapan akuntansi yang dilakukan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?
2. Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
3. Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara terstruktur?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
5. Apakah ada kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa?

B. Penerapan SAP No.01 dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa

1. Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?
2. Apa saja jenis laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa?
3. Apakah ada kendala yang dialami pemerintah desa dalam penerapan SAP No. 01?

C. Kualitas pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa

1. Bagaimana pemerintah desa mengelola laporan keuangannya agar berkualitas?
2. Apakah ada sistem khusus yang digunakan pemerintah desa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas?
3. Apakah ada hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan?

D. Penerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi pada pertanggungjawaban keuangan desa?

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa yang dibuat?
2. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa ?
3. Bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam menangani pertanyaan publik mengenai pertanggungjawaban keuangan desa?
4. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
5. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?
6. Apa bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap penerapan pengelolaan keuangan desa?

LAMPIRAN 2

Daftar Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
1.	Bagaimana prosedur/penerapan akuntansi yang dilakukan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?	Semua laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan prosedur dan penerapannya berdasarkan ketentuan dari pemerintah.	Kepala Desa
2.	Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa	Ada beberapa data yang digunakan yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa yang pastinya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.	
3.	Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan secara terstruktur?	Tentu saja, pihak desa telah melaksanakan pelaporan secara terstruktur berdasarkan ketentuan pemerintah.	
4.	Siapa saja yang terlibat	Yang pastinya yang terlibat	

	dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa?	dalam proses pembuatan laporan ini adalah perangkat desa. Pada saat perencanaan pembangunan kita juga melibatkan masyarakat dalam evaluasi perencanaan ADD dan musyawarah.	
5.	Apakah ada kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Untuk pembuatan laporannya terkadang kita masih menggunakan buku panduan dan Alhamdulillah dalam penyusunan laporan kita juga dibantu oleh pihak kecamatan.	
6.	Apakah pemerintah desa sudah menerapkan PSAP No. 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?	Sudah. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang dibuat sudah sesuai dengan PSAP no.01	
7.	Apa saja jenis laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah desa?	Laporan yang dimiliki pemerintah desa juga sudah lengkap dan sesuai dengan standar pemerintahan. Ada 7 jenis laporannya, ada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan	

		Perubahan SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan .	
8.	Apakah ada kendala yang dialami pemerintah desa dalam penerapan SAP No. 01?	Salah satu kendala yang dialami pemerintah desa dalam penerapan ini seperti minimnya kemampuan sdm dan kurangnya pengalaman, tetapi kami juga dibantu pihak kecamatan dalam mengatasi masalah ini.	
9.	Bagaimana pemerintah desa mengelola laporan keuangannya agar berkualitas?	Dengan melaksanakan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dengan menyusun laporan keuangannya secara wajar.	Bendahara Desa
10.	Apakah ada sistem khusus yang digunakan pemerintah desa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas?	Saat ini pemerintah desa telah menggunakan aplikasi dalam pengelolaan keuangan yang sangat membantu pihak desa dalam menyusun laporan keuangan secara efektif dan efisien.	
11.	Apakah ada hal-hal yang	Tentu saja ada, seperti	

	dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan?	kurangnya kualitas sdm yang dimiliki akan berdampak pada kualitas laporan yang dihasilkan.	
12.	Bagaimana peran pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa yang dibuat?	Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab mengenai anggaran yang dimiliki desa sasaran nya juga untuk masyarakat. Sudah menjadi tanggungjawab pemerintahan desa atas anggaran tersebut yang nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan dan untuk kepentingan lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Sekretaris Desa
13.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa ?	Kita akan memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk papan informasi yang terdapat dikantor desa dan dihimbau kepada aparat desa agar memberikan informasi sewajarnya saja untuk menghindari adanya kesalahpahaman.	
14.	Bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam	Meskipun kami terbuka sewajarnya terhadap	

	menangani pertanyaan publik mengenai pertanggungjawaban keuangan desa?	masyarakat, namun pihak desa juga berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dana yang ada telah terealisasikan sesuai dengan apa yang telah dimusyawarahkan. Jika ada pertanyaan dari masyarakat kami selaku aparat desa sebisa mungkin menjelaskan apa adanya. Baik dalam penggunaan dana, kendalanya apa saja akan kita sampaikan kepada masyarakat jika ingin mengetahui lebih dalam.	
15.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Saya pribadi merasa pengelolaan pertanggungjawaban di desa ini cukup baik dengan adanya bukti-bukti pembangunan yang terealisasikan.	Ibu Juliana (Masyarakat Sei Silau Timur)
16.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?	Mungkin masyarakat secara umum tidak dilibatkan dalam musyawarah tetapi hanya beberapa perwakilan dari masyarakat saja.	

17.	Apa bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap penerapan pengelolaan keuangan desa?	Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dengan ikut serta saat ada pembangunan di desa.	
-----	---	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN 3

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Silau Timur



Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Sei Silau Timur



Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Desa Sei Silau Timur



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN 4

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa TA 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA SEI SILAU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	763.819.600,00	763.819.600,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	763.819.600,00	763.819.600,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	763.819.600,00	763.819.600,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	633.071.475,00	632.834.025,00	237.450,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional:	497.217.050,00	496.979.600,00	237.450,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat I	382.400.000,00	382.400.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	382.400.000,00	382.400.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	382.400.000,00	382.400.000,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	371.400.000,00	371.400.000,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang	14.467.050,00	14.229.600,00	237.450,00
5.1.	Belanja Pegawai	14.467.050,00	14.229.600,00	237.450,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.467.050,00	14.229.600,00	237.450,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.108.800,00	1.016.400,00	92.400,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.358.250,00	13.213.200,00	145.050,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, l	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	770.000,00	770.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	135.854.425,00	135.854.425,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	3.501.875,00	3.501.875,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	3.501.875,00	3.501.875,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	3.501.875,00	3.501.875,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	3.501.875,00	3.501.875,00	0,00
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasaran	132.352.550,00	132.352.550,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	132.352.550,00	132.352.550,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	132.352.550,00	132.352.550,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelak	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	41.305.000,00	41.305.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	85.697.550,00	85.697.550,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00
02.01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	116.775.000,00	116.775.000,00	0,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	82.125.000,00	82.125.000,00	0,00
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (W.	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	400.000,00	400.000,00	0,00
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagama:	74.025.000,00	74.025.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.025.000,00	74.025.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	74.025.000,00	74.025.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	74.025.000,00	74.025.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	773.021.475,00	772.784.025,00	237.450,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.201.875,00)	(8.964.425,00)	(237.450,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.201.875,00	9.201.875,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.201.875,00	9.201.875,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	9.201.875,00	9.201.875,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	237.450,00	(237.450,00)

Sei Silau Timur, 05 Desember 2021

KEPALA DESA

JAMALUDDIN, SH

LAMPIRAN 5

Format Formulir/ Daftar :

1. Peraturan Desa

LAMBANG PEMDES	PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN
-------------------	---

RANCANGAN PERATURAN DESA

NOMOR..... TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang	:	Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor); 6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20..... MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....
------------	---	---

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

SUMAI ERA UIARA MEDAN

2. Laporan Pertanggungjawaban Rrealisasi Pelaksanaan APBDesa

Lampiran I Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 APBDesa
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURAN	KET.
G		(Rp.)	(Rp.)	G (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				

				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				

2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				

3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				
			- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL

TTD
(KEPALA DESAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3. Laporan Kekayaan Milik Desa

Lampiran II Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang: Laporan Kekayaan Milik Desa
 Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

TANGGAL
 TTD
 (KEPALA DESA)

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS**I. IDENTITAS**

Nama : Melia Syahfitri
NIM : 0502181028
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Silau Timur, 14 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Akuntansi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Sei Silau Timur, Kec. Buntu Pane Kab. Asahan
No. Hp : 082161779014
Alamat Email : meliasafitri153@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 010108 Sei Silau Timur, Berijazah tahun 2012
2. Tamatan SMP N 6 Kisaran, Berijazah tahun 2015
3. Tamatan SMK N 2 Kisaran, Berijazah tahun 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN